Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2716-0394

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TRANSMIGRASI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Sri Rahmanita,[1] Kurniati,[2] Indah Sari Palinrungi[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: srirahmanita99@gmail.com[1]

Abstract

Education is the beacon of hope for improving the quality of human resources, so that it becomes an important task for local governments to improve the quality of education by carrying out empowerment programs, one of which is through an education handling program that directly involves rural communities, especially in transmigration areas. This study aims to determine the procedures of the Regional Government regarding the handling of education and the inhibiting factors as well as supporting the role of the Regional Government in handling education in the Siyasah Syar'iyyah Transmigration Area. The research method used is a type of qualitative-descriptive research with a syar'iyyah approach and a Social Empirical approach, data collection uses primary data, namely data obtained from the field collected through observation, interviews, and documentation and secondary data, namely data collected through literature and relevant articles. The results of the siyasah Syar'iyyah perspective is carried out through several stages, namely the socialization stage regarding the importance of education to transmigration communities with high dropout rates. Programs implemented by the government are increasing the productivity of transmigration resident, facilitating resident byfollowing up when there is input from residents regarding facilities and infrastructure. Funding for educational facilities all comes from the center.

Keywords: *Education; Transmigrant Area; Local Government; Siyasah Syar'iyyah.*

Abstrak

Pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan program pemberdayaan, salah satunya melalui program penanganan Pendidikan pendidikan yang melibatkan secara langung masyarakat desa terkhusus di daerah transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Pemerintah Daerah terhadap penanganan Pendidikan dan faktor penghambat serta pendukung peran Pemerintah Daerah terhadap penanganan Pendidikan di Daerah Transmigrasi Perspektif Siyasah Syar'iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan syar'iyyah dan pendekatan Sosial Empiris, pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui literatur dan artikel yang relevan. Hasil

Sri Rahmanita Tamrin, Kurniati, Indah Sari Palinrungi Peran Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Pendidikan di Daerah Transmigrasi Perspektif Siyasah Syar'iyyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 2 (2026): 206-219.

penelitian dari perspektif siyasah syar'iyyah dilakukan dengan melalui beberapa tahap yakni tahap sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat transmigrasi yang tinggi angka putus sekolah. Program yang dilaksanakan pemerintah yakni meningkatkan produktivitas warga transmigrasi, memfasilitasi warga dengan menindaklanjuti ketika ada masukan dari warga terkait sarana dan prasarana. Pendanaan untuk fasilitas pendidikan semua berasal di pusat.

Kata Kunci: Pendidikan; Daerah Transmigrasi, Pemerintah Daerah; Siyasah Syar'iyyah.

PENDAHULUAN

Potensi manusia yang diilhamkan Tuhan yaitu ia diberi akal dan kemampuan berekspresi dan berbicara. Tubuhnya diperindah, ditegakkan dan dipermudah geraknya dengan organ tubuh yang lengkap. Manusia sebagai makhluk yang unik untuk mempertahankan hidupnya antara lain dengan mengambil manfaat dari alam raya ini, baik yang berada di permukaan bumi, di perut bumi atau di angkasa raya. Salah satunya dengan menggali ilmu pengetehuan yang ada.[1] Dewasa ini komunikasi dan teknologi berkembang amat pesat sehingga ilmu pengetahuan pun, harus terus dikembangkan.[2]

Kebutuhan manusia terbagi kedalam tiga kebutuhan yaitu, kebutuhan primer (daruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyat).[3] Ilmu pengetahuan menjadi kebutuhan primer yang harus ada, karena tanpa ilmu pengertahuan akan mengancam keselamatan di dunia dan akhirat.[4]

Pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, sebab pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan bagi setiap jiwa yang tumbuh dan berkembang tiada hentinya, untuk itu pendidikan wajib diberikan kepada seluruh masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat yang hidup di kota maupun daerah terpencil, lokasi daerah yang terpencil dan jauh dari kota tidak menjadi alasan bagi mereka untuk

[1] Abdullah, Dudung. "Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya." *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 5, no. 1 (2016): h. 14.

[2] Fatimah. "Hukum dan Perubahan Sosial." *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Volume 4, no. 1 (2015): h. 107.

[3] Kurnia Munir, Zulfahmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Volume 2, no. 3 (2021): h. 494.

[4] Bismi Nursyamsia Maryam, m Thahir Maloko. "Keselamatan Kerja dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Siyasatun: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Volume 3, no. 2 (2022): h. 245.

tidak mendapatkan pendidikan yang layak, [5] sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke - 4, yaitu : "mencerdaskan kehidupan bangsa " , dapat terwujud secara adil dan merata.[6] Anak sebagai tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masalah negara kelak akan menjadi tanggung jawab mereka, sehingga mereka harus dibekali dengan pendidikan yang baik.[7]

Upaya membangun masyarakat setempat dan menuntut kesejahteraan semua manusia untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum dan budaya masyarakat terutama dalam pendidikan.[8] Sebagaimana fungsi dari negara Indonesia yaitu adanya kewajiban suatu negara untuk mewujudkan kepentingan masyarakat atau lebih tepatnya kepentingan umum.[9] Yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan betapa pentingnya pendidikan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik guna membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. [10] Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maka perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang dinyatakan masih rendah dibandingkan dengan kualitas pendidikan negara lain.[11] Sepeti halnya pada masa kekahalifahan Umar yang mengubah anak-anak padang pasir yang liar menjadi bangsa pejuang yang berdisiplin dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki.[12] Dan juga semaraknya gerakan modernism di timur Tengah yang melahirkan peradaban baru yang membuka pintu-pintu baru di bidang pengetahuan.[13]

---

5 M. Viqy Saputra Misya. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2014."*Jurnal JOM FISIP* Volume.4, no. 1 (2017): h. 2.

6 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 3.

7 Andi Husnul, Marilang. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Volume 2, no. 3 (2021): h. 506.

8 Usman Jafar, Patimah. "Perlindungan dan Pmeberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Jurnal Siyasatun: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Volume 3, no. 2 (2022): h. 423

9 Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)." *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 4, no. 1 (2015): h. 135.

10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

11 Sulis Anjarwati, Kusuma wardani dan Fitri April Y. "Lokakarya dan Pelatihan Pembuatan Preparat Biologi bagi Guru-Guru SMA di Lampung Timur". *Journal of Community Service Volume* .2, no. 2 (2020): h. 58. 1.

12 Kurniat. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al Fikr* Volume 17, no. 1 (2017) : h.180.

13 Azman. "Perkembangan Fiqh pada Era Modern serta Para Tokohnya." *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 6, no. 1 (2017) : h. 52.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan adanya peran pemerintah daerah Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilakukannya program pemberdayaan, yang salah satunya melalui program penanganan pendidikan yang melibatkan secara langung masyarakat desa khususnya di daerah transmigrasi.[14] Penanganan Pendidikan kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan peran yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah transmigrasi.[15] Dan juga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih baik lagi.[16] Serta dapat menjadi bekal untuk kelangsungan hidup masyarakat baik untuk urusan dunia dan akhiratnya.[17]

Daerah transmigrasi merupakan perpindahan dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat penduduknya dalam batas Negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang.[18] Salah satu daerah yang terdapat daerah transmigrasi yaitu Desa TellulimpoE yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng. Dimana lokasi ini dipilih oleh peneliti sebagai subjek penelitian.

Setelah peneliti melakukan observasi awal yang menunjukkkan bahwa pembangunan (fisik) di desa TellulimpoE sudah terbilang cukup baik. Kelengkapan fasilitas pelayanan publik yang ada di Desa TellulimpoE pada dasarnya sudah baik dengan adanya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ketersediaan air bersih akan tetapi fasilitas tersebut belum terlalu maksimal terkhusus bagi masyarakat desa yang ada di daerah transmigrasi. Sementara pembangunan non-fisik juga terbilang cukup baik mulai dari aktifnya kegiatan Posyandu, adanya pengobatan gratis, adanya festival budaya, hingga masih terpeliharanya identitas lokal yakni gotong royong warga setempat.

Meskipun demikian, sebagian penduduk Desa TellulimpoE belum menikmati fasilitas seperti jaringan internet dan Pendidikan dengan baik seperti daerah-daerah perkotaan. Kurangnya fasilitas tentang Pendidikan pentingnya suatu pendidikan yang

---

[14] Usman. "Konflik Hukum Islam dan Solusinya." *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 7, no. 1 (2018): h. 36.

[15] Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas. "Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Volume 3, no. 1 (2021): h. 69.

[16] Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif. "Efektivitas Bp4 Kua Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektf Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Volume 3, no. 3 (2021): h. 514.

[17] Sirajuddin, Muhammad Saleh Ridwan, Musyfika Ilyas. "Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Volume 4, no. 1, (2022): h. 36.

[18] Musdalifah. "*Pengaruh Transmigrasi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pessoloreng Kabupaten Wajo*". (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018): h. 6.

tersedia membuat distribusi informasi dan lain sebagainya menjadi tidak secepat di daerah-daerah lain, sehingga diperlukan peran pemerintah agar penduduk di daerah transmigrasi yang ada di Desa TellulimpoE juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas Pendidikan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan syar'iyyah dan pendekatan Sosial Empiris, pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui literatur dan artikel yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Pemerintahan Daerah terhadap Penanganan Pendidikan di Daerah Transmigrasi Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Trasmigrasi penduduk yang dari pulau Jawa ke Kabupaten Soppeng dimulai sejak 2004, dengan fasilitas lahan yang disediakan oleh pemerintah setempat yaitu seluas 10 hektar, dengan rincian 25are/KK sebagai bentuk fasilitas penunjang mata pencaharian penduduk transmigran. Adapun peran yang dijalankan oleh Pemeritah Daerah TellulimpoE dalam mengPendidikan masyarakat trasmigrasi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, beliau memaparkan:

> *"Peran pemerintah desa dalam mengPendidikan masyarakat. Dalam wilayah transmigrasi terdapat wilayah UPT (Unit Pelaksana teknis), setelah itu diserahkan kepada pemerintah desa, pemerintah desa berperan utk mengPendidikan masyarakat tentang pentingnya suatu Pendidikan agar dapat bersinergi dan bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar maupun pemerintah."* [19]

Dalam proses Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, masih banyak pemuda yang kurang peduli terhadap pentingnya suatu Pendidikan. Pemerintah telah memberikan berbagai Pendidikan seperti melakukan sosialisasi, sarana dan prasarana di sekolah yang sudah tercukupi serta pembangunan sekolah.

Penempatan para penduduk transmigran ini didasari oleh terbitnya SK dari Pemerintah Pusat kemudian pengelolaan penduduk transmigran diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Adapun mengenai pengelolaan Pendidikan bagi

[19] Darwis, Kepala Desa, *wawancara,* Desa Tellulimpoe, 6 Mei 2022.

masyarakat transmigrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memiliki program, yakni:

> *"Program yang dilaksanakan pemerintah yakni meningkatkan produktivitas warga transmigrasi, memfasilitasi warga dengan menindaklanjuti ketika ada masukan dari warga terkait sarana dan prasarana. Pendanaan untuk fasiltas pendidikan semua berasal di pusat."* [20]

Daerah Kecamatan Tellulimpoe sebelum datangnya masyarakat transmigrasi belum mempunyai sarana atau tempat pendidikan. Maka dari itu pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat daerah transmigrasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah Desa, beliau mengatakan:

> *"Perhatian khusus difokuskan pada sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dikarenakan tingginya angka putus sekolah"* [21]

Pada masa awal masyarakat Tellulimpoe yang ingin bersekolah harus melalui perjuangan yang sangat panjang, karena pada masa itu masyarakat Tellulimpoe menuntut ilmu ke daerah Bulue dengan berjalan kaki, dan bagi yang mempunyai sepeda maka perjalanan ini lebih akan membantu. Dengan kondisi tempat pendidikan yang jauh, maka bagi masyarakat yang ingin bersekolah harus tinggal atau kos di daerah Bulue. Sebahagian masyarakat Tellulimpoe lebih memilih tidak bersekolah, selain karena jauhnya tempat pendidikan dan juga disebabkan oleh susahnya akses menuju sekolah. Maka itu hanya beberapa orang saja yang mengecap bangku pendidikan. Pada umumnya daerah Tellulimpoe sebelum datangnya masyarakat Transmigrasi merupakan daerah perkebunan. Sampai dengan datangnya masyarakat transmigrasi yang dimulai dari tahun 2004 membuat daerah tersebut menjadi pemukiman warga.

Berdasakan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Transmigrasi Kabupaten Soppeng, dalam hal ini Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan mengenai perkembangan Pendidikan yang ada di wilayah transmigrasi, bahwa:

> *"Tenaga pengajar yang mengajar disana dianggarkan tersendiri di pusat. Jadi dulu itu sangat diperhatikan bagi tenaga pengajar yang mengajar di transmigrasi. Namun setelah lepas, sudah tidak ada lagi anggaran, sehingga kurang aktifnya juga sekolah disana"* [22]

---

[20] Andi Dharma, Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, *wawancara,* 4 Mei 2022.
[21] Darwis, Kepala Desa, *wawancara,* Kota Soppeng, 6 Mei 2022.
[22] Andi Dharma, Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, *wawancara,* Desa Tellulimpoe, 5 Mei 2022.

Jadi sebelum dinaungi oleh Pemerintah Daerah Soppeng, Pendidikan di daerah Transmigrasi dinaungi oleh Dinas Transmigrasi Soppeng. Hal tersebut membuat Pendidikan kurang mendapat perhatian lagi setelah diambil alih oleh pemerintah daerah setempat. Hal tersebut yang memicu tenaga pendidik dan peserta didik kurang termotivasi karena kurangnya anggaran yang dikeluarkan yang juga berdampak pada sarana dan prasarana disekolah.

Kemudian pada tahun 2005 didirikan sekolah-sekolah. Sekolah pertama yang didirikan ialah Sekolah Dasar (SD), walaupun sekolah ini didirikan namun belum ada gedung khusus untuk sekolah ini, pendidikan dilaksanakan dirumah warga, sementara untuk tenaga pengajar diambil dari masyarakat transmigrasi yang bersedia untuk menjadi guru honor.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu tenaga pengajar Guru SD UPT transmigrasi, herni menjelaskan:

> *"Sarana dan prasarana pendidikan di daerah transmigrasi cukup memadai. Dibuktikan dengan adanya alat peraga atau media pembelajaran. Terkadang fasilitas yang tidak disediakan di sekolah transmigrasi dibawa langsung dari sekolah induk. Karena sekolah yang ada di transmigrasi ada kelas jauh dari SDN 249 Mattiro bulu."* [23]

Namun untuk sekolah SMP masyarakat juga harus bersekolah di daerah Bulue. Semakin berkembangnya daerah Tellulimpoe secara bertahap dan juga didukung dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat, maka didirikanlah beberapa sekolah dari berbagai tingkat.

Adanya sarana pendidikan tersebut telah mengubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan dan menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Walaupun sebagian besar masyarakat Tellulimpoe bersekolah, namun tidak bisa dihindari ternyata masih banyak pemuda-pemuda yang tidak mau untuk bersekolah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemuda Tellulimpoe yang lebih tertarik untuk menjalankan usaha keluarganya dengan berkebun Cacao (Buah Coklat), perkebunan Mete, dan Peternakan ayam potong dan ayam petelur. Usaha ini membawa perkembangan dalam bidang perekonomian masyarakat Tellulimpoe, sehingga meningkatkan mutu pendidikan dengan terus melanjutkan pendidikan di tingkat lanjutan.

[23] Herni,Tenaga Pengajar SD, *wawancara,* Desa Tellulimpoe, 7 Mei 2022.

2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pendidikan di Daerah Transmigrasi

Pengemudi ojek online (ojol) merupakan bagian penting dari sistem transportasi modern di banyak kota besar di Indonesia. Mereka memberikan layanan antar jemput yang cepat, fleksibel, dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, para pengemudi ojol juga sering menjadi andalan dalam layanan pengantaran makanan, barang, dan kebutuhan harian lainnya. Meskipun pekerjaan ini memberikan peluang ekonomi yang signifikan, pengemudi ojol sering dihadapkan pada tantangan seperti pendapatan yang fluktuatif, risiko kecelakaan di jalan, dan tekanan dari sistem insentif aplikasi yang ketat. Oleh karena itu, perlindungan hak dan kesejahteraan mereka menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan aplikasi dan pemerintah.

Penyelenggaraan pendidikan di daerah transmigrasi merupakan salah satu aktivitas yang telah berlangsung sekian lama di dalam masyarakat. Diketahui bahwa pendidikan berlangsung sejak mereka menginjakkan kakinya di daerah tersebut. Akan tetapi peningkatannya baru nampak setelah para transmigran merasa mapan secara ekonomi dan juga perubahan pada pola pikir mereka.

Berbagai bentuk pelaksanaan pendidikan telah nampak pada masyarakat transmigran di Tellulimpoe saat ini. Pelaksanaan pendidikan yang terjadi pada masyarakat mengalami pertumbuhan dengan melihat data tingkat pendidikan penduduk.

Tabel: Data Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Penduduk Buta Huruf	
2	Penduduk tidak tamat SD / Sederajat	517
3	Penduduk tamat SD / Sederajat	1031
4	Penduduk tamat SLTP / Sederajat	269
5	Penduduk tamat SLTA / Sederajat	310
6	Penduduk tamat D-1	7
7	Penduduk tamat D-2	12
8	Penduduk tamat D-3	9
9	Penduduk tamat S-1	96
10	Penduduk tamat S-2	1

11	Wajib Belajar ;	
	a. Usia 7 – 15 Tahun	344
	b. Usia 7 – 15 Tahun yang masih belajar	232
	c. Usia 7 – 15 Tahun yang tidak sekolah	112

Sumber: Arsip Pemerintah Daerah Tellulimpoe

Pada awal kedatangan para mayasrakat transmigran di daerah Kecamatan Tellulimpoe, Pemerintah Daerah Tellulimpoe mengupayakan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang perkembangan Pendidikan. Dalam wawancara yang dilaksanakan dengan Kepala Dinas Transmigrasi, beliau mengatakan bahwa:

> *"Dalam hal upaya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah transmigrasi, terdapat beberapa factor pengahambat dan penunjang yakni: Faktor penghambat, terkait tidak adanya anggaran dari pemerintah desa, ketika mengajukan ke Pemerintah Pusat prosesnya sangat Panjang. Kemudian Faktor pendukung, adanya persatuan diantara warga."*[24]

Secara umum, masyarakat transmigran di Kecamatan Tellulimpoe sangat peduli terhadap pendidikan. Namun, terdapat proses yang sangat Panjang pada saat pengurusan anggaran. Hal tersebut menjadi penghambat dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan di daerah transmigrasi

Dalam menunjang perkembangan Pendidikan menurut salah satu tenaga pengajar yang ada di SD UPT Tellulimpoe, beliau mengatakan:

> *"Faktor penghambat nya yakni: akses jalanan menuju transmigrasi lumayan jelek terlebih lagi ketika musim penghujan, sedangkan guru yang mengajar di transmigrasi hanya 1 orang yang menetap di kawasan tersebut. Jadi ketika akses jalan tidak bisa ditempuh yang mengajar pada saat hanya 1 guru saja, sedangkan yang diajak terdapat 3 kelas (1-3). Faktor pendukung yakni: disamping media pembelajaran yg lengkap juga gedung nya cukup memadai karena gedung sekolah nya sudah permanen dan guru yang mengajar di daerah transmigrasi juga cukup terjamin, dalam hal ini mendapat honor khusus dari dinas transmigrasi."*[25]

[24] Andi Dharma, Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, *wawancara,* Desa Tellulimpoe,6 Mei 2022.
[25] Herni, Tenaga Pengajar SD, *wawancara,* Desa Tellulimpoe,7 Mei 2022.

Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam Peran Pemerintah Daerah dalam penanganan Pendidikan di Daerah Transmigrasi berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah beliau menegaskan bahwa:

> *"Faktor penghambat infrastruktur, meyebabkan terjadinya kendala terbesar pembinaan masyarakat tidak berkesinambungan. Sehingga warga asli transmigrasi balik, sehingga melenceng dari niat awal sebagaimana pengertian dari transmigrasi. Banyaknya warga yang pulang, sehingga menjual tanah dan barangnya lalu kembali ke kampung semula."* [26]

Jadi disamping factor pendukung dalam peran pemerintah terhadap penanganan Pendidikan di daerah transmigrasi, masih banyak warga asli transmigrasi (yang berasal dari luar daerah) yang pulang ke daerah asalnya. Tanah yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat bercocok tanam dijual lalu pulang ke daerh asalnya.

Infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan terhabatnya akses masyarakat transmingrasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, hal ini ditegaskan pula oleh salah satu masyarakat, bahwa:

> *"Keluhan masyarakat terkait jalan yang rusak, sehingga akses menuju sekolah, pasar, dan tempat lain agak sulit dijangkau."*[27]

Anggaran yang minim dari pemerintah pusat menyebabkan terjadinya hambatan dalam mengadakan perbaikan infrastruktur hal inilah yang menyebabkan masyarakat transmigrasi memilih untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh masyarakat terkait dengan harapannya kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa:

> *"Kami berharap kepada pemerintah agar diperbaiki jalannya, dan lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan karena di daerah transmigrasi tinggi akan putus sekolah."*[28]

Maka dari itu peran pemerintah daerah sangat berperang terhadap pentingnya Pendidikan di daerah transmigrasi. Masyarakat di daerah transmigrasi sangat memerlukan perbaikan jalan agar sekolah yang jauh akan mudah diakses dengan mudah oleh peserta didik dan pendidik.

---

[26] Darwis, Kepala Desa, *wawancara,* Desa Tellulimpoe,4 Mei 2022.
[27] Gandi, Anggota *Masyarakat, wawancara,* Desa Tellulimpoe,3 Mei 2022.
[28] Gandi, Anggota *Masyarakat, wawancara,* Desa Tellulimpoe,3 Mei 2022.

3. Pandangan Siyasah Syar'iyyah terhadap Penanganan Pendidikan di Daerah Transmigrasi

Siyasah Syar'iyyah merupakan cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer Siyasah Syar'iyyah seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.[29]

Maka dari itu, peninjauan tentang peran pemerintah daerah dalam penanganan Pendidikan merupakan perpanjang tangan pemerintah daerah dan disini peneliti menggunakan peninjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara islam (Siyasah Syar'iyyah). Mengingat, pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah adalah permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara dan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu hukum tata negara.

Pemerintah dalam Siayasah Syar'iyyah bertanggung jawab penuh dalam memfasilitasi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah SWT di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah menangani pendidikan dalam masyarakat dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana.

Solusi dalam pemerintah daerah untuk menangani Pendidikan dengan mengPendidikan masyarakat tentang pentingnya suatu Pendidikan agar dapat bersinergi dan bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar maupun pemerintah. Program yang dilaksanakan pemerintah yakni meningkatkan produktivitas warga transmigrasi, memfasilitasi warga dengan menindaklanjuti ketika ada masukan dari warga terkait sarana dan prasarana. Pendanaan untuk fasilitas pendidikan semua berasal di pusat.

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan terhadap Pemerintah daerah. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini ialah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh pembantunya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi kewajiban setiap umum baik yang berkenaan dengan tugas-

[29] Kurniati, Ashabul Kahfi. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuma* Volume 2, no 2 (2021): h. 245.

tugas keagamaan maupun masyarakat, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti melindungi hak-hak rakyat.

Dalam konteks siyasah syar'iyyah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dijauhi dan dihindari. Ketika ada sebuah peraturan yang memberikan pemerintah bertentangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhan yang terkait hal tersebut.

Menurut peneliti, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah dalam tugasnya yaitu memberi kemudahan kepada masyarakat melalui program kegiatan sosialisasi tentang pentingnya suatu Pendidikan, menerima serta mempertimbangkan saran-saran yang diberikan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah telah berupaya keras untuk menangani Pendidikan tentang pentingnya suatu Pendidikan hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program-program kegiatan yang dilakukan pleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Prosedur Pelaksanaan Pemerintahan Daerah terhadap Penanganan Pendidikan di Daerah Transmigrasi perspektif siyasah syar'iyyah dilakukan dengan melalui beberapa tahap yakni tahap sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat transmigrasi yang tinggi angka putus sekolah. Program yang dilaksanakan pemerintah yakni meningkatkan produktivitas warga transmigrasi, memfasilitasi warga dengan menindaklanjuti ketika ada masukan dari warga terkait sarana dan prasarana. Pendanaan untuk fasilitas pendidikan semua berasal di pusat. Adapun pandangan maqashid syariah terhadap unsur pokok yang berhubungan dengan pendidikan yaitu memelihara akal dan jiwa. Pendidikan dapat memelihara akal dengan adanya pembelajaran. Adapun hubungan pemeliharaan akal dengan Pendidikan yaitu upaya melindungi akal, kemerdekaan berfikir, kecerdasan akal, berpikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Syariah Islam memerintahkan manusia untuk berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif dengan bimbingan rohani dan berpikir tentang alam semesta demi kemajuan kesejahteraan dan peradaban yang kita dapatkan lewat Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdullah, Dudung. "Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya", *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2016).

Abdullah. "Implementasi Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah dan Pada Masa Sekarang", *Jurnal Kependidikan* 2, no. 2 (2014).

Anjarwati, Sulis, Kusuma wardani dan Fitri April Y. "Lokakarya dan Pelatihan Pembuatan Preparat Biologi bagi Guru-Guru SMA di Lampung Timur". *Journal of Community Service* 2, no. 2 (2020).

Azman. "Penerapan Syariat Islam", *Jurnal al- daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* 7, no. 2, (2018).

Azman. "Perkembangan Fiqh pada Era Modern serta Para Tokohnya", *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2017).

Fatimah. "Hukum dan Perubahan Sosial", *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).

Husnul, Andi, Marilang. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2021).

Jafar, Usman, Patimah. "Perlindungan dan Pmeberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyyah", *Jurnal Siyasatun: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 3, no. 2 (2022).

Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas. "Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2021).

Kurniati, Ashabul Kahfi. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah", *Siyasatuma*, 2. no 2 (2021).

Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam", *Al Fikr* 17, no. 1 (2017).

Maryam, Bismi Nursyamsia, M Thahir Maloko. "Keselamatan Kerja dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Siyasatun: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 3, no 2 (2022).

Misya, M Viqy Saputra. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2014."*Jurnal JOM FISIP* 4, no. 1 (2017).

Munir, Kurnia, Zulfahmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2021).

Putri, Rizma Syamwali, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif. Efektivitas Bp4 Kua Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektf Hukum Islam", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2021).

Sirajuddin, Muhammad Saleh Ridwan, Musyfikallyas. "Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2022).

Usman, Subehan. "Peran Pemerintah dalam pemberdayaan forum kerukunan umat beragama di kabupaten Soppeng", *Jurnal ALDEV: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2, (2021).

Usman. "Konflik Hukum Islam dan Solusinya", *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2018).

Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)", *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no 1, (2015).

Skripsi

Musdalifah. Pengaruh Transmigrasi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pessoloreng Kabupaten Wajo, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018.

Peraturan

Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

Wawancara

Andi Dharma, Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, wawancara, Desa Tellulimpoe, 4 Mei 2022.

Darwis, Kepala Desa, wawancara, Desa Tellulimpoe, 6 Mei 2022.

Gandi, Anggota Masyarakat, wawancara, Desa Tellulimpoe, 3 Mei 2022.

Herni,Tenaga Pengajar SD, wawancara, Desa Tellulimpoe, 7 Mei 2022.